



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS)

Volume 2, Number 1, April 2025, Page 12-22

e-ISSN: 3047-5694 (Media Online)

Email: kelasjips@gmail.com

Website: <https://naturiedukasi.com/index.php/jpipsjelas/index>



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Accepted February 01, 2025, Approved March 30, 2024, Published April 30, 2025

Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem Demokrasi di Desa Poopo Barat, Kec. Ranoyapo, Kab.Minahasa Selatan

Yulyke Eklesia Sumakul¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: 120606035@unima.ac.id, romimesra@unima.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Desa Poopo Barat, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang demokrasi masih bersifat umum dan terfokus pada aspek kebebasan pendapat, implementasi sistem demokrasi masih mengandalkan pendekatan top-down melalui Hukum Tua dan sosialisasi pemerintah, serta partisipasi masyarakat menunjukkan toleransi politik yang tinggi namun masih bersifat pasif. Temuan mengindikasikan perlunya edukasi politik yang sistematis, penguatan institusi demokrasi lokal, dan pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih aktif. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model demokrasi desa yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip demokrasi modern untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan akuntabel di tingkat desa.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Pelaksanaan Sistem Demokrasi, Desa Poopo Barat

Abstract. This study aims to analyze the role of the community in the implementation of the democratic system in West Poopo Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency. The research method used is qualitative with data collection techniques through participatory observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive analysis model consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the community's understanding of democracy is still general and focused on the aspect of freedom of opinion, the implementation of the democratic system still relies on a top-down approach through the Old Law and government socialization, and community participation shows high political tolerance but is still passive. The findings indicate the need for systematic political education, strengthening local democratic institutions, and developing more active participation mechanisms. This study recommends the development of a village democracy model that integrates traditional values with modern democratic principles to create a responsive and accountable government system at the village level.

Keywords: The Role of Society, Implementation of the Democratic System, West Poopo Village

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan pilihan masyarakat sebagai upaya mewujudkan hak rakyat yang dijalankan oleh pemerintah. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuatan atau pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat (Prasojo, 2005). Konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Seluruh masyarakat memiliki hak yang setara untuk mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

Pentingnya kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat terletak pada kemampuannya untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan nyaman bagi seluruh warga. Demokrasi tidak hanya sebatas sistem politik, tetapi juga merupakan cara hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Muluk, 2007). Di Indonesia, implementasi demokrasi telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi tahun 1998, dimana konsep kedaulatan rakyat mulai diterapkan secara lebih konsisten dalam berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Sistem demokrasi yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi desa merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan implementasi nilai-nilai demokratis. Menurut Nasution (2009), partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran, tenaga, materi, hingga partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan. Partisipasi ini menjadi wujud nyata dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan turut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Dalam konteks pemerintahan desa, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem pemilihan kepala desa, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Purnamasari (2006) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan di daerahnya. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan kebutuhan lokal.

Realitas pelaksanaan demokrasi di tingkat desa menunjukkan dinamika yang beragam, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan, implementasi sistem demokrasi desa menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang unik. Masyarakat Minahasa memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah mufakat yang kuat, yang sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat, seperti tingkat pendidikan yang beragam, akses informasi yang terbatas, dan pemahaman yang kurang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.

Desa Poopo Barat di Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, merupakan salah satu desa yang menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem demokrasi yang ideal. Sebagai bagian dari masyarakat Minahasa yang memiliki kearifan lokal yang kaya, masyarakat Desa Poopo Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan

lokal. Namun, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peran masyarakat dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan sistem demokrasi, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan participatif.

Sistem demokrasi yang baik di tingkat desa memerlukan komitmen tidak hanya dari pemerintah desa, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif. Masyarakat harus memiliki pola pikir yang baik dan pemahaman yang adequate tentang hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi. Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Desa Poopo Barat, sehingga dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan accountable. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang peran masyarakat dalam sistem demokrasi desa, diharapkan dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera, serta dapat meminimalisir potensi konflik yang mungkin timbul akibat kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembodo (2006) tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, dan kepemimpinan lokal, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan akses terhadap informasi. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya bersifat pasif sebagai penerima program, tetapi juga aktif sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator program pembangunan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika partisipasi masyarakat, namun fokusnya lebih pada aspek pembangunan fisik dan ekonomi, belum secara khusus mengkaji aspek demokrasi dalam pemerintahan desa.

Studi yang dilakukan oleh tim peneliti di Kabupaten Banyumas mengenai pengembangan model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk interaksi langsung melalui rembug desa di tingkat RT, maupun melalui unsur keterwakilan seperti BPD dan PKK (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2018). Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa model partisipasi yang efektif memerlukan kombinasi antara mekanisme formal dan informal, dimana masyarakat dapat berpartisipasi baik melalui lembaga-lembaga yang telah ditetapkan maupun melalui forum-forum diskusi yang lebih fleksibel. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang model partisipasi, namun konteks geografis dan budaya Jawa Tengah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Sulawesi Utara, sehingga perlu dilakukan kajian yang spesifik untuk wilayah Minahasa Selatan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, teridentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan dalam studi tentang peran masyarakat dalam pelaksanaan sistem demokrasi di tingkat desa. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan ekonomi, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji aspek demokrasi dalam pemerintahan desa, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengukur tingkat partisipasi, namun kurang menggali aspek kualitatif tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari.

Kesenjangan lainnya terletak pada minimnya penelitian yang mengkaji implementasi demokrasi desa dalam konteks kearifan lokal masyarakat Minahasa. Penelitian-penelitian yang ada umumnya dilakukan di Jawa dan Sumatera, sehingga temuan-temuannya belum tentu dapat digeneralisasi untuk

wilayah lain yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Desa Poopo Barat sebagai bagian dari masyarakat Minahasa memiliki sistem nilai dan norma sosial yang khas, yang berpotensi mempengaruhi cara masyarakat memahami dan mempraktikkan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal masyarakat Minahasa dalam konteks pemerintahan desa.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang khusus mengkaji peran masyarakat dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Desa Poopo Barat dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Minahasa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan etnografi yang mendalam untuk memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi dipahami, diinterpretasikan, dan dipraktikkan oleh masyarakat lokal dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan normatif atau kuantitatif, penelitian ini akan menggali aspek-aspek kualitatif yang lebih mendalam tentang makna demokrasi bagi masyarakat desa dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam proses demokratisasi di tingkat lokal.

Aspek kebaruan lainnya adalah upaya untuk mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi desa yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Minahasa. Model yang akan dikembangkan akan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi universal dengan kearifan lokal masyarakat Minahasa, sehingga dapat menjadi alternatif model demokrasi yang autentik dan sustainable. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep demokrasi lokal yang tidak hanya mengadopsi model demokrasi Barat, tetapi juga menghargai dan memanfaatkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam masyarakat.

Realitas pelaksanaan sistem demokrasi di Desa Poopo Barat menunjukkan dinamika yang kompleks antara ekspektasi ideal demokrasi dengan praktik yang terjadi di lapangan. Masyarakat desa umumnya telah familiar dengan konsep musyawarah mufakat yang merupakan warisan budaya lokal, namun pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi modern masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam rapat desa dan pengambilan keputusan masih didominasi oleh tokoh-tokoh tertentu, sementara kelompok masyarakat lainnya, terutama perempuan dan pemuda, masih kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip demokrasi yang mengutamakan partisipasi semua warga dengan realitas sosial yang masih menunjukkan pola-pola hierarkis dalam masyarakat.

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi sistem demokrasi di Desa Poopo Barat adalah terbatasnya akses informasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dengan masyarakat. Meskipun telah ada berbagai forum komunikasi seperti rapat RT/RW dan musyawarah desa, namun penyampaian informasi tentang program-program pemerintah dan proses pengambilan keputusan masih belum optimal. Hal ini mengakibatkan rendahnya awareness masyarakat terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama dan mengurangi efektivitas partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Selain itu, faktor geografis dengan topografi yang berbukit dan akses transportasi yang terbatas juga menjadi kendala dalam mobilisasi partisipasi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil dalam wilayah desa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna dari pengalaman masyarakat dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Desa Poopo Barat. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan praktik masyarakat

dalam sistem demokrasi desa. Sugiyono (2016) menegaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball sampling, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti (Bungin, 2007). Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas masyarakat dalam forum-forum demokrasi seperti musyawarah desa, rapat RT/RW, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat memperoleh data tentang pola interaksi, dinamika komunikasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang berlangsung dalam proses demokrasi di tingkat desa. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial budaya yang mempengaruhi praktik demokrasi dalam masyarakat.

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan masyarakat terhadap sistem demokrasi di desa. Menurut Kvale (1996), wawancara kualitatif adalah percakapan dengan tujuan untuk memahami dunia dari sudut pandang subjek, untuk mengungkap makna pengalaman mereka, untuk mengungkap dunia hidup mereka sebelum penjelasan ilmiah. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yang memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti (Sugiyono, 2016). Informan yang dipilih meliputi tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga masyarakat biasa yang memiliki keterlibatan dalam aktivitas demokrasi desa.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan seleksi, kategorisasi, dan pengorganisasian data hasil observasi dan wawancara yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif yang menggambarkan temuan-temuan penelitian secara sistematis dan komprehensif. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis terhadap pola-pola yang muncul dari data, dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat Desa Poopo Barat.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh Denzin (2009). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi sumber), menggunakan berbagai metode pengumpulan data (triangulasi teknik), dan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda (triangulasi waktu). Selain itu, dilakukan juga member checking yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dan peer debriefing yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat. Melalui prosedur ini, diharapkan dapat diperoleh data yang valid dan reliable untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang peran masyarakat dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Desa Poopo Barat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Demokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MT, diperoleh pemahaman bahwa demokrasi dipersepsikan sebagai kebebasan pendapat yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pengambilan

keputusan untuk kesejahteraan hidup mereka. Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami demokrasi dalam konteks yang sangat praktis dan berorientasi pada hasil, yaitu kesejahteraan hidup. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip dasar demokrasi yang memberikan ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, pemahaman ini masih bersifat umum dan belum menunjukkan kedalaman tentang mekanisme dan proses demokrasi yang lebih kompleks seperti checks and balances, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan.

Informan MT juga menekankan bahwa masyarakat dapat memberikan hak mereka dalam memberi keputusan untuk melakukan suatu sistem politik. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran tentang hak politik yang dimiliki oleh warga negara, meskipun masih perlu diperdalam pemahaman tentang kewajiban yang menyertai hak tersebut. Konsep hak politik yang dipahami oleh masyarakat tampaknya lebih fokus pada aspek pemberian suara atau pendapat, namun belum mencakup aspek-aspek lain seperti hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mengawasi kinerja pemerintah, dan hak untuk berorganisasi. Pemahaman yang terbatas ini dapat menjadi kendala dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang lebih komprehensif.

Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan edukasi politik perlu terus ditingkatkan untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang konsep demokrasi. Pemahaman yang dangkal dapat menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami tidak hanya hak-hak mereka, tetapi juga tanggung jawab dan kewajiban dalam sistem demokrasi. Selain itu, pemahaman tentang mekanisme checks and balances, pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta peran lembaga-lembaga demokrasi lainnya juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih bermakna dalam proses demokrasi.

Konteks budaya lokal juga mempengaruhi cara masyarakat memahami demokrasi. Dalam masyarakat Minahasa yang memiliki tradisi musyawarah mufakat yang kuat, konsep demokrasi seringkali dipahami dalam kerangka tradisi tersebut. Hal ini dapat menjadi kekuatan karena tradisi musyawarah mufakat sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, namun juga dapat menjadi keterbatasan jika tidak dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodasi dinamika politik modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan konsep demokrasi modern agar dapat tercipta sistem demokrasi yang autentik dan sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

b. Implementasi Sistem Demokrasi di Tingkat Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem demokrasi di Desa Poopo Barat dilakukan melalui berbagai mekanisme formal yang melibatkan struktur pemerintahan dari tingkat desa hingga kabupaten. Menurut informan MT, sistem demokrasi politik dijalankan sesuai dengan arahan pemerintah yang dilakukan melalui Hukum Tua yang ada ataupun sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak kecamatan maupun kabupaten. Hal ini menunjukkan adanya hirarki dalam implementasi demokrasi, dimana inisiatif dan arahan cenderung berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat desa. Model implementasi top-down ini memiliki keunggulan dalam hal koordinasi dan standarisasi, namun juga dapat mengurangi ruang untuk inisiatif dan kreativitas lokal dalam mengembangkan model demokrasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Peran Hukum Tua sebagai tokoh adat dan pemimpin informal dalam masyarakat Minahasa menjadi sangat penting dalam proses implementasi demokrasi di tingkat desa. Hukum Tua berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah formal dengan masyarakat adat, sehingga dapat memfasilitasi proses sosialisasi dan implementasi kebijakan-kebijakan terkait demokrasi. Namun, ketergantungan yang tinggi pada figur Hukum Tua juga dapat menjadi kelemahan jika tidak diimbangi dengan pengembangan kapasitas kelembagaan yang lebih luas. Diperlukan upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi formal

seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya agar proses demokrasi tidak terlalu bergantung pada individu tertentu.

Informan BT memberikan perspektif yang berbeda dengan menyoroti aspek pengawasan dalam proses demokrasi. Menurut informan ini, masyarakat sudah mengusulkan setiap masyarakat yang akan turut andil mengawasi kegiatan pemilihan umum yang akan datang. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam proses demokrasi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip checks and balances dalam demokrasi. Namun, perlu dikaji lebih lanjut apakah mekanisme pengawasan ini sudah berjalan secara efektif dan apakah masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut.

Gambar 1. Wawancara dengan Bpk BT



Sumber: Data Primer

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kabupaten merupakan upaya penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem demokrasi. Namun, efektivitas sosialisasi ini perlu dievaluasi secara kontinyu untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Sosialisasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu mengubah mindset dan behavior masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, metode sosialisasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal, menggunakan bahasa dan media yang mudah dipahami, serta melibatkan tokoh-tokoh lokal yang dipercaya oleh masyarakat.

c. Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Proses Demokrasi

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Desa Poopo Barat menunjukkan pola yang beragam dengan tingkat keterlibatan yang bervariasi antar kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan BT, terlihat bahwa masyarakat sudah menunjukkan sikap yang baik dalam menjalankan atau melaksanakan sistem demokrasi politik. Sikap positif ini tercermin dalam bentuk saling menghargai keputusan dan hak satu sama lain yang terlibat dalam sistem demokrasi dan politik. Hal ini menunjukkan adanya toleransi politik yang cukup baik dalam masyarakat, yang merupakan fondasi penting bagi berjalannya sistem demokrasi. Toleransi ini mencerminkan kematangan politik masyarakat yang dapat menerima perbedaan pendapat dan pilihan politik tanpa menimbulkan konflik atau perpecahan dalam masyarakat.

Informan SP memberikan gambaran tentang komitmen personal dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Menurut informan ini, masyarakat telah berperan aktif dalam melaksanakan sistem demokrasi politik dengan baik dan tidak merugikan satu sama lain. Komitmen untuk melibatkan diri dalam melaksanakan demokrasi dan politik dengan baik dan benar menunjukkan adanya kesadaran tentang pentingnya partisipasi individual dalam sistem demokrasi. Namun, pernyataan bahwa partisipasi dilakukan

dengan "tidak merugikan satu sama lain" menunjukkan bahwa masih ada kekhawatiran tentang potensi konflik yang dapat timbul dari perbedaan politik. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme resolusi konflik dan dialog politik yang konstruktif dalam masyarakat.

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu SP



Sumber: Data Primer

Kriteria pemilihan pemimpin yang dikemukakan oleh informan SP mencerminkan pemahaman masyarakat tentang kualitas yang diharapkan dari seorang pemimpin dalam sistem demokrasi. Keinginan untuk memilih wakil rakyat yang mencintai masyarakat dan memiliki jiwa pemimpin yang berwibawa dan berkelakuan baik menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat aspek teknis atau programatik dari calon pemimpin, tetapi juga aspek moral dan personal. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal yang mengutamakan integritas dan kedekatan emosional antara pemimpin dengan masyarakat. Namun, kriteria ini juga perlu diimbangi dengan pemahaman tentang kompetensi teknis dan visi kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan yang efektif.

Meskipun terlihat adanya partisipasi dan sikap positif terhadap demokrasi, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan peran masyarakat dalam proses demokrasi. Partisipasi yang ada masih cenderung bersifat pasif, dalam artian masyarakat lebih banyak menjadi penerima informasi dan pelaksana instruksi dari pemerintah, daripada menjadi inisiator dan pengontrol proses demokrasi. Diperlukan upaya untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif dan kritis, dimana masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi juga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Selain itu, perlu juga dikembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengontrol kinerja pemerintah secara kontinyu, tidak hanya pada saat pemilihan.

2. Pembahasan

a. Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Demokrasi dalam Perspektif Teoritis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Poopo Barat tentang demokrasi masih bersifat umum dan belum mencakup dimensi-dimensi kompleks dari sistem demokrasi modern. Hal ini sejalan dengan teori demokrasi yang dikemukakan oleh Dahl (1973) yang menekankan bahwa demokrasi mengandung dua dimensi utama yaitu kontestasi dan partisipasi. Dahl merumuskan tatanan politik yang disebut Polyarchy yang menekankan dua dimensi - kontestasi dan partisipasi. Pemahaman masyarakat yang masih terfokus pada aspek kebebasan pendapat menunjukkan bahwa dimensi partisipasi telah dipahami, namun dimensi kontestasi yang meliputi kompetisi politik yang fair dan terbuka masih perlu diperdalam. Menurut Dahl (1982), demokrasi yang efektif memerlukan inclusiveness dan public contestation, dimana semua warga negara dewasa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan terdapat kompetisi yang bebas antar kelompok politik.

Konsep demokrasi sebagai "kebebasan pendapat" yang dipahami oleh masyarakat mencerminkan pemahaman yang masih parsial terhadap kompleksitas sistem demokrasi. Huntington (1991) dalam karyanya tentang gelombang ketiga demokratisasi menegaskan bahwa transisi demokrasi tidak hanya melibatkan perubahan institusional, tetapi juga transformasi budaya politik masyarakat. Gelombang demokrasi selalu terjadi pada Negara-negara di dunia, gelombang demokrasi pertama pada tahun 1828-1926 yang berawal dari adanya gerakan Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika. Dalam konteks Indonesia, proses demokratisasi yang dimulai sejak era reformasi memerlukan waktu yang panjang untuk mengubah mindset masyarakat dari budaya politik yang otoriter menjadi demokratis. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat yang masih terbatas bukanlah fenomena yang mengejutkan, tetapi merupakan bagian dari proses transformasi yang masih berlangsung.

Pentingnya edukasi politik dalam memperdalam pemahaman masyarakat tentang demokrasi sejalan dengan konsep civic education yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Almond dan Verba (1963) menekankan bahwa budaya politik yang demokratis memerlukan civic competence yang tinggi dari warga negara. Civic competence mencakup tidak hanya pengetahuan tentang sistem politik, tetapi juga keterampilan dan sikap yang mendukung partisipasi politik yang efektif. Dalam konteks Desa Poopo Barat, pengembangan civic competence menjadi kunci untuk mengoptimalkan implementasi sistem demokrasi. Hal ini memerlukan program edukasi politik yang sistematis dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan sikap toleran terhadap perbedaan politik.

b. Implementasi Sistem Demokrasi Desa dalam Kerangka Teori Desentralisasi

Implementasi sistem demokrasi di Desa Poopo Barat yang mengandalkan instruksi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi menunjukkan pola yang kontradiktif dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut Rondinelli (1981), desentralisasi yang efektif memerlukan transfer kewenangan yang nyata dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal, termasuk dalam hal pengambilan keputusan politik. Model implementasi top-down yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi di tingkat desa masih sangat bergantung pada inisiatif dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yang dapat menghambat berkembangnya demokrasi yang autentik dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap model desentralisasi di Indonesia yang seringkali bersifat administrative decentralization daripada political decentralization.

Peran Hukum Tua dalam implementasi sistem demokrasi di Desa Poopo Barat mencerminkan pentingnya kepemimpinan tradisional dalam proses democratization di tingkat lokal. Putnam (1993) dalam studinya tentang demokrasi di Italia menekankan bahwa modal sosial (social capital) yang terwujud dalam bentuk kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial merupakan prasyarat penting bagi berjalannya demokrasi yang efektif. Robert Putnam (2008) mendapatkan kesimpulan yang senada: demokrasi dapat bekerja di masyarakat yang partisipasi warganya kuat. Hukum Tua sebagai pemimpin tradisional yang memiliki legitimasi sosial yang tinggi dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai tradisional dengan sistem demokrasi modern. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada figur individual dapat menjadi kelemahan jika tidak diimbangi dengan penguatan institusi-institusi demokrasi formal.

Mekanisme pengawasan yang dikembangkan oleh masyarakat dalam proses pemilu menunjukkan adanya pemahaman tentang pentingnya checks and balances dalam sistem demokrasi. Hal ini sejalan dengan teori demokrasi liberal yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan. Diamond (1999) menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi memerlukan pengembangan institusi-institusi yang dapat mengontrol kekuasaan eksekutif dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks desa, pengawasan masyarakat terhadap proses pemilu merupakan manifestasi dari prinsip horizontal accountability yang penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, efektivitas pengawasan ini bergantung pada kapasitas dan pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pengawasan yang tepat serta dukungan dari kerangka hukum yang memadai.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Desa: Analisis Teori Partisipasi Politik

Pola partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dalam penelitian ini mencerminkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di tingkat lokal. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Sikap saling menghargai dan toleransi yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Poopo Barat merupakan indikator positif bagi konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Verba, Schlozman, dan Brady (1995) dalam model Civic Voluntarism mereka mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik: resources (sumber daya), psychological engagement (keterlibatan psikologis), dan mobilization (mobilisasi). Toleransi politik yang tinggi menunjukkan adanya psychological engagement yang positif terhadap sistem demokrasi, meskipun masih perlu dikaji lebih lanjut aspek resources dan mobilization.

Kriteria pemilihan pemimpin yang dikemukakan oleh masyarakat menunjukkan dominasi faktor personal dan moral dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini sejalan dengan konsep political culture yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1963) tentang parochial political culture, dimana orientasi politik masyarakat lebih berfokus pada aspek personal daripada institutional. Meskipun hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang mengutamakan integritas personal, namun juga dapat menjadi hambatan bagi berkembangnya political efficacy yang lebih sophisticated. Inglehart dan Welzel (2005) menegaskan bahwa modernisasi politik memerlukan pergeseran dari orientasi politik yang bersifat parochial menuju civic political culture yang lebih menekankan pada aspek institutional dan programmatic. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kompetensi teknis dan visi programmatik dalam kepemimpinan politik.

Tantangan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang masih bersifat pasif mencerminkan fenomena yang umum terjadi dalam proses demokratisasi di negara-negara berkembang. Pateman (1970) dalam teorinya tentang participatory democracy menekankan pentingnya participatory experience dalam mengembangkan democratic competence masyarakat. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang melibatkan warga dalam mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi yang dilakukan warga dapat bersifat individual ataupun kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan. Partisipasi yang berkelanjutan dan terorganisir memerlukan pembelajaran dan habituasi yang sistematis. Dalam konteks Desa Poopo Barat, pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih aktif dan kritis memerlukan pendekatan yang gradual dan cultural sensitive, yang menghargai nilai-nilai tradisional sambil mengembangkan kapasitas democratic citizenship yang lebih modern.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Desa Poopo Barat menunjukkan karakteristik yang kompleks dengan berbagai potensi dan tantangan. Pemahaman masyarakat tentang konsep demokrasi masih bersifat umum dan perlu diperdalam melalui edukasi politik yang sistematis dan berkelanjutan. Implementasi sistem demokrasi di tingkat desa masih mengandalkan pendekatan top-down yang mengurangi ruang untuk inisiatif dan kreativitas lokal, meskipun peran tokoh tradisional seperti Hukum Tua memberikan kontribusi positif dalam proses sosialisasi dan mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menunjukkan tingkat toleransi politik yang tinggi dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, namun masih cenderung bersifat pasif dan perlu dikembangkan menuju partisipasi yang lebih aktif dan kritis.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan model demokrasi desa yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, penguatan kapasitas institusional di tingkat desa untuk mengurangi ketergantungan pada pendekatan top-down, dan pengembangan program edukasi politik yang cultural sensitive untuk meningkatkan civic competence masyarakat. Selain itu, diperlukan juga penguatan mekanisme partisipasi yang memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik di tingkat

desa. Dengan demikian, sistem demokrasi di Desa Poopo Barat dapat berkembang menjadi lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal.

E. Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1973). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1982). *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control*. New Haven: Yale University Press.
- Denzin, N. K. (2009). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. (2018). Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 312-332.
- Kvale, S. (1996). *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Muluk, M. R. K. (2007). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nasution, Z. (2009). *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Prasojo, E. (2005). *Reformasi Kedua: Melengkapi Reformasi Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Purnamasari, D. (2006). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 145-162.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2008). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145.
- Sembodo, H. (2006). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(1), 45-68.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.